



Efektivitas Aplikasi Government Resource Management System (GRMS) dalam Meningkatkan Kinerja Administrasi Pembangunan di Kota Surabaya

Marsya Lismaya¹, Vidya Imanuari Pertiwi²

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

*Corresponding author : marsyalismaya08@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 17, 2024

Revised December 15, 2024

Accepted December 26, 2024

Available online January 21, 2025

Kata Kunci:

Efektivitas, Tata Kelola Pemerintahan yang baik, *Government Resource Management System*.

Keywords:

Effectiveness, Good Governance, Government Resource Management System



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Sagita Akademia Maju..

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Government Resource Management System (GRMS) dalam meningkatkan kinerja administrasi pembangunan di Kota Surabaya. GRMS, yang telah diimplementasikan sejak tahun 2004, dirancang untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah dan administrasi pembangunan melalui sistem terintegrasi yang mencakup e-Planning, e-Budgeting, dan e-Procurement. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap pegawai terkait, serta pengukuran efektivitas berdasarkan lima indikator: pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi dan pelatihan yang baik berkontribusi pada peningkatan pemahaman pengguna terhadap GRMS. Ketepatan sasaran program GRMS juga terbukti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Meskipun terdapat kendala teknis dan non-teknis, seperti mutasi pegawai, upaya maksimal dilakukan untuk menjaga ketepatan waktu dan mencapai tujuan program. GRMS berhasil meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam administrasi pembangunan, serta diakui sebagai model oleh pemerintah daerah

lain. Indikator keberhasilan program ini meliputi peningkatan pelayanan publik, pengurangan penggunaan kertas, dan penghargaan yang diterima. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah lain dalam penerapan sistem serupa untuk meningkatkan kinerja administrasi dan pelayanan publik.

ABSTRACT

This study aims to evaluate the effectiveness of Government Resource Management System (GRMS) in improving the performance of development administration in Surabaya City. GRMS, which has been implemented since 2004, is designed to improve local financial management and development administration through an integrated system that includes e-Planning, e-Budgeting, and e-Procurement. The research method used is a qualitative approach with in-depth interviews with relevant employees, as well as measuring effectiveness based on five indicators: program understanding, target accuracy, timeliness, goal achievement, and real change. The results showed that good socialization and training contributed to an increase in user understanding of GRMS. The accuracy of the GRMS program target is also proven to increase transparency and accountability in budget management. Despite technical and non-technical obstacles, such as employee transfers, maximum efforts were made to maintain timeliness and achieve program objectives. GRMS has successfully improved transparency, accountability and efficiency in development administration, and is recognized as a model by other local governments. Indicators of the program's success include improved public services, reduced paper usage, and

awards received. This research is expected to provide recommendations for other local governments in implementing similar systems to improve administrative performance and public services.

1. PENDAHULUAN

Dalam era digital yang semakin berkembang pesat, pemerintah di seluruh dunia berupaya mencari cara untuk membuat pelayanan publik lebih mudah diakses bagi masyarakat. Maraknya penggunaan media komunikasi berbasis internet telah mempengaruhi dan mendorong mekanisme kerja pemerintah di seluruh negara untuk menyesuaikan kerja dan kinerjanya, tidak terkecuali Indonesia. *Electronic Government* atau *e-government* atau *e-govt* merupakan penggunaan jaringan internet dalam penyebaran informasi dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat - "*The employment of the Internet and the world-wide-web for delivering government information and services to the citizens*" (United Nations dalam (E, n.d.)).

Menggabungkan portal pemerintah elektronik, aplikasi seluler, dan berbagai layanan elektronik lainnya, sistem pemerintah berbasis elektronik ini memudahkan warga Indonesia untuk mengakses dan menemukan informasi dan layanan publik secara online. Masyarakat tidak lagi terbatas oleh hambatan fisik atau geografis yang dapat mencegah mereka mendapatkan pelayanan publik yang mereka butuhkan dengan adanya sistem ini. Layanan ini tersedia bagi masyarakat dari mana saja, kapan saja, tanpa harus pergi ke kantor pemerintah secara langsung (Choirunnisa et al., 2023). Pemerintah Kota Surabaya telah mengambil langkah inovatif dengan mengimplementasikan *Government Resource Management System* (GRMS) sejak tahun 2004 (Irpan Nurhab, 2022). GRMS merupakan upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dengan penerapan sistem ini, diharapkan dapat terjadi perbaikan signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah dan administrasi pembangunan, sehingga dapat meningkatkan kinerja administrasi dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran.

Berbagai kemudahan seperti kecepatan pelayanan dan peningkatan kinerja kompetensi telah dapat dicapai melalui *Government Resource Management System* yang disingkat GRMS (Apriliani & Panggiarti, 2020). *Government Resource Management System* (GRMS) dirancang sebagai suatu sistem terintegrasi yang mencakup berbagai proses administratif penting, mulai dari *e-Planning*, *e-Budgeting*, *e-Procurement*, *e-Delivery* dan *e-Controlling*. Sistem ini dirancang untuk memperbaiki kinerja administrasi pembangunan dengan memudahkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, *Government Resource Management System* (GRMS) bertujuan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada perangkat daerah dan masyarakat (Fanida & Niswah, 2015). Di sisi lain, GRMS juga berkontribusi pada peningkatan kinerja kompetensi pegawai pemerintah. Sistem ini menyediakan alat dan fitur yang memudahkan pegawai dalam menjalankan tugas mereka, sehingga mereka dapat bekerja lebih produktif dan efisien. Pelatihan dan pembelajaran melalui GRMS juga membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai, mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan kerja yang semakin kompleks.

Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, penerapan sistem seperti *Government Resource Management System (GRMS)* menjadi semakin penting dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik. Konsep tata kelola pemerintahan yang baik mendorong pemerintah untuk membangun dan menjaga hubungan yang harmonis dengan sektor swasta dan masyarakat, serta menciptakan tata kelola yang efektif dan efisien. Dengan mengadopsi sistem seperti *GRMS*, pemerintah dapat lebih mudah mencapai tujuan-tujuan ini dan memastikan bahwa proses administrasi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Humairo Amriza & Suhartati, 2022). Penerapan *e-Government* dapat memfasilitasi hubungan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat secara lebih efisien dan produktif. Implementasi *Government Resource Management System (GRMS)* oleh Pemerintah Kota Surabaya merupakan salah satu contoh nyata dari upaya tersebut, di mana sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif tetapi juga sebagai pendorong perubahan budaya pemerintahan yang lebih baik. Dengan adanya *Government Resource Management System (GRMS)*, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat melakukan pengawasan dan pengendalian anggaran secara *real-time*, sehingga meminimalkan kemungkinan terjadinya penyimpangan.

Secara keseluruhan, penerapan *Government Resource Management System (GRMS)* di Surabaya merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan pengelolaan sumber daya pemerintah yang efektif dan efisien. Melalui penelitian ini, diharapkan akan terungkap sejauh mana *Government Resource Management System (GRMS)* dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kinerja administrasi pembangunan serta mendukung terciptanya *good governance* yang lebih baik di Indonesia (Maulidhia, 2020).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Legi et al., 2020) disimpulkan bahwa Model Implementasi *e-Government* dalam ranah *Government to Government (G to G)*, *Government to Citizen (G to C)*, dan *Government to Education (G to Ed)* untuk mendukung kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan menciptakan efektivitas dan efisiensi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan layanan informasi secara optimal terhadap masyarakat, mewujudkan *good Governance* dan meningkatkan keunggulan dan daya saing global. Sedangkan (Nurnovianti & Karniawati, 2024) dalam penelitiannya berkesimpulan bahwa layanan publik berbentuk situs web resmi masih perlu ditingkatkan karena masih terdapat beberapa hambatan.

Dalam penelitian sebelumnya, Apriliani & Panggiarti (2020) berkesimpulan bahwa penerapan *Government Resources Management System (GRMS)* di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Jawa Tengah memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan. Meskipun *GRMS* menawarkan kemudahan, tantangan seperti kurangnya familiaritas pegawai dan integrasi sistem yang belum optimal masih ada. Penelitian merekomendasikan perlunya pelatihan bagi pegawai dan reformasi budaya kerja untuk mengoptimalkan fungsi *GRMS* sebagai alat tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, fokus utama dari penelitian ini adalah efektivitas sistem *Government Resource Management System (GRMS)* dalam meningkatkan kinerja administrasi Pembangunan di Kota Surabaya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan mengumpulkan data melalui

wawancara dengan pegawai Sekretariat Daerah Kota Surabaya Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan Administrasi Pembangunan, menggunakan teori (Sutrisno, 2007) yang terdiri atas lima indikator yaitu: pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata, selain itu pengumpulan data dilakukan dengan literasi melalui berbagai jurnal.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah lain dalam menerapkan sistem serupa untuk meningkatkan kinerja administrasi pembangunan dalam pengelolaan keuangan daerah dan administrasi pembangunan, sehingga dapat mengurangi praktik korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap literatur mengenai inovasi dalam manajemen sumber daya pemerintah dan penerapan teknologi informasi dalam sektor publik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan bagi Pemerintah Kota Surabaya tetapi juga bagi pembuat kebijakan di tingkat nasional, dalam upaya menciptakan kinerja yang lebih efektif dan efisien.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *studi kasus* (Rahardjo, 2017). Studi kasus dalam penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk mendalami suatu kasus tertentu secara mendalam dengan melibatkan pengumpulan berbagai sumber informasi melalui observasi dan wawancara. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami konteks dan dinamika yang ada dalam kasus tersebut, serta mengidentifikasi pola-pola atau tema-tema yang muncul dari data yang telah dikumpulkan.

Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pegawai Sekretariat Daerah Kota Surabaya, khususnya Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan, yang bertanggung jawab atas pengelolaan GRMS dan data sekunder berasal dari studi pustaka. Lokasi penelitian berada di Kantor Pemerintah Kota Surabaya, tepatnya di Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan, Jl. Jimerto No. 25-27, Lantai 4. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada keterlibatan langsung unit tersebut dalam pengelolaan GRMS yang menjadi fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dilakukan dengan pegawai yang mengelola GRMS untuk memahami pemahaman mereka terhadap program, kendala yang dihadapi, serta keberhasilan program. Selain itu peneliti mengamati langsung pelaksanaan GRMS, termasuk proses pengelolaan anggaran dan pengadaan barang/jasa menggunakan sistem ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas program dari Sutrisno (2007). Efektivitas didefinisikan sebagai seberapa baik pekerjaan dilakukan dan sejauh mana menghasilkan keluaran sesuai dengan harapan. Lima dimensi untuk mengukur efektivitas program adalah:

1. **Pemahaman Program:** Pemahaman aktor pelaksana terhadap program menjadi indikator pertama efektivitas.
2. **Ketepatan Sasaran:** Sasaran program harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan regulasi yang ada.

3. **Ketepatan Waktu:** Program dinilai efektif apabila dapat dilaksanakan sesuai jadwal.
4. **Tercapainya Tujuan:** Program yang efektif menghasilkan manfaat yang sesuai dengan tujuan awal.
5. **Perubahan Nyata:** Efektivitas juga terlihat dari dampak nyata yang dihasilkan oleh program (Sutrisno, 2007).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Government Resource Management System (GRMS) yang diterapkan di Kota Surabaya adalah suatu aplikasi yang tertata dibawah naungan Sekretariat Daerah Kota Surabaya Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan. Dalam aplikasi GRMS memuat beberapa web diantaranya e-Planning, e-Budgeting, e-Project Planning, e-Procurement, e-Delivery, e-Controlling, dan e-Performance. A

plikasi tersebut berujuan untuk mengakomodir Perangkat Daerah di Kota Surabaya secara sistematis dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan rekap realisasi pelaksanaan hingga dilaporkan sebagai bentuk penilaian kerja.

Penerapan *Government Resource Management System* (GRMS) di Surabaya merupakan suatu langkah yang strategis untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pengelolaan keuangan daerah. Sistem ini memfasilitasi pengadaan barang/jasa dan administrasi pembangunan dapat dilakukan dengan lebih transparan, mengurangi potensi korupsi, dan meningkatkan efisiensi anggaran. Selain itu, *Government Resource Management System* (GRMS) juga memfasilitasi pengawasan anggaran secara *real-time* oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang memungkinkan deteksi dini terhadap penyimpangan anggaran. Pemerintah Kota Surabaya perlu memberikan sosialisasi mengenai *Government Resource Management System* (GRMS) kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar mereka lebih memahami manfaat dan fungsi sistem ini.

Efektivitas *Government Resource Management System* (GRMS) dalam Meningkatkan Kinerja Administrasi Pembangunan di Kota Surabaya diukur dengan berdasarkan indikator efektivitas program menurut Sutrisno (2007) yang terdiri atas lima indikator yaitu: pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata.

1. Pemahaman Program

Sutrisno (2007) mengatakan bahwa pemahaman program merupakan indikator pertama dalam efektivitas program. Pemahaman terhadap suatu program merupakan kunci keberhasilan dari implementasi program sehingga program dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, para pengguna program tersebut sangat memerlukan pemahaman yang baik agar program dapat digunakan dengan efektif. Pemahaman program dalam aplikasi *Government Resource Management System* (GRMS) adalah cara untuk para pengguna program tersebut dapat memahami program *Government Resource Management System* (GRMS).

Berdasarkan wawancara peneliti kepada Mba Sandi sebagai Analis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran di Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan mengatakan bahwa:

“Sosialisasi atau pelatihan yang dilakukan pada umumnya untuk meningkatkan pemahaman bagi seluruh Perangkat Daerah sebagai pengguna aplikasi GRMS sehari-hari dalam pelaksanaan anggaran Pemerintah Kota Surabaya. Sosialisasi tersebut dilakukan setiap adanya pengembangan atau tambahan fitur pada aplikasi GRMS. Dengan sosialisasi tersebut diharapkan dapat efektif untuk meningkatkan pemahaman pengguna GRMS pada seluruh Perangkat Daerah, namun kami tetap selalu memberikan pelayanan setiap saat setelah sosialisasi terlaksana, untuk sedia dalam menjawab semua pertanyaan Perangkat Daerah terkait GRMS.”

Pemahaman tersasar dengan baik kepada para pengguna GRMS dengan sosialisasi kepada seluruh Perangkat daerah, sehingga para pengguna GRMS mengerti cara menggunakan semua program GRMS. Dari pernyataan Mba Sandi, dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap program GRMS disampaikan dengan baik kepada para pengguna melalui sosialisasi kepada seluruh Perangkat Daerah. Hal ini memastikan bahwa para pengguna GRMS mengerti cara menggunakan semua fitur dan fungsi yang ada dalam program GRMS, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan lebih efektif dan efisien. Sosialisasi yang rutin dan layanan dukungan yang tersedia setiap saat juga memastikan bahwa pengguna GRMS selalu mendapatkan informasi terbaru dan bantuan yang mereka butuhkan. Dengan demikian, pemahaman program yang baik menjadi fondasi penting dalam keberhasilan implementasi GRMS di Kota Surabaya.

2. Ketepatan Sasaran

Indikator ketepatan sasaran program merupakan sasaran yang dituju harus sesuai dengan ketetapan peraturan sebelumnya agar program mampu dijalankan secara efektif. Ketepatan sasaran program Government Resource Management System (GRMS) di Kota Surabaya sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan dapat tercapai secara efektif. GRMS dirancang untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa serta administrasi pembangunan. Dapat dilihat bahwa semua proses penganggaran, pengadaan, dan pelaksanaan proyek dapat diakses oleh perangkat daerah secara real-time melalui web *e-procurement*. Selain itu setiap transaksi keuangan dapat dipertanggungjawabkan, dan proses bisnis melalui GRMS menjadi lebih cepat dan efektif, mengurangi potensi kesalahan dan penyalahgunaan anggaran.

Dalam upaya memastikan ketepatan sasaran program Government Resource Management System (GRMS) di Kota Surabaya, dilakukan wawancara dengan beberapa pihak terkait untuk mendapatkan pandangan lebih mendalam mengenai implementasi dan efektivitas program ini. Wawancara ini bertujuan untuk menggali lebih jauh apakah sasaran yang ditetapkan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan yang ada, serta bagaimana peraturan dan kebijakan yang mendasari program ini membantu dalam pencapaian tujuannya.

Mba Sandi sebagai Analis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran di Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan mengatakan bahwa:

*“Sasaran yang ditetapkan dalam program GRMS sudah sesuai, karena aplikasi GRMS sendiri pasti berkembang dan melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota yang berlaku. Selain itu juga terdapat peraturan atau kebijakan yang menjadi dasar dalam penentuan sasaran program GRMS, pada aplikasi e-Project dasar aturannya adalah Surat Edaran Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) TA 2024, pada aplikasi e-Delivery dasar aturannya adalah **Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021** tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sedangkan pada aplikasi e-performance menerapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 133 Tahun 2023 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Kami terus berupaya agar pelaksanaan GRMS dapat mempermudah dalam pelaksanaan proses belanja dan realisasi anggaran sesuai tugas dan fungsi dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Selain itu dalam praktiknya, GRMS bukan hanya aplikasi yang mempermudah Perangkat Daerah untuk pelaksanaan anggaran, namun juga membantu kami sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam mengendalikan Perangkat Daerah untuk melaksanakan aturan yang berlaku, seperti pengoptimalan penggunaan Produk Dalam Negeri dan UMKM, pemberdayaan Masyarakat dalam program Padat Karya, prioritas dalam pelaksanaan belanja secara elektronik dan lain sebagainya.”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dinyatakan bahwa ketepatan sasaran program GRMS di Kota Surabaya telah sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan dalam proses administrasi pembangunan, karena aplikasi GRMS terus berkembang dan melakukan penyesuaian terhadap peraturan yang berlaku, memastikan bahwa program ini tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Peraturan dan kebijakan yang mendasari program GRMS juga menjadi faktor penting dalam menentukan ketepatan sasaran. Aplikasi eProject didasarkan pada Surat Edaran Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) TA 2024, sedangkan aplikasi eDelivery mengikuti Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain itu, aplikasi ePerformance menerapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 133 Tahun 2023 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Dengan dasar kebijakan yang kuat, program GRMS dirancang untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan efektif.

Sejauh ini, GRMS telah mampu mencapai sasaran dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, pelaksanaan GRMS mempermudah proses belanja dan realisasi anggaran sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dalam jangka panjang, GRMS tidak hanya mempermudah pelaksanaan anggaran tetapi juga membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam mengendalikan Perangkat Daerah agar mematuhi aturan yang

berlaku. Hal ini mencakup pengoptimalan penggunaan Produk Dalam Negeri dan UMKM, pemberdayaan masyarakat dalam program Padat Karya, dan prioritas pelaksanaan belanja secara elektronik.

Dengan demikian, indikator ketepatan sasaran menurut Sutrisno (2007) tercermin dalam implementasi GRMS di Kota Surabaya. Program ini dirancang dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, didukung oleh dasar kebijakan yang kuat, dan telah menunjukkan kemampuan untuk mencapai sasaran dalam jangka pendek dan jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa GRMS efektif dalam meningkatkan kinerja administrasi pembangunan di Kota Surabaya.

3. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu merupakan indikator penting dalam mengukur efektivitas program Government Resource Management System (GRMS) di Kota Surabaya. GRMS dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan keuangan daerah serta proses pengadaan barang dan jasa. GRMS memungkinkan penjadwalan pengadaan barang dan jasa dilakukan secara tepat waktu. Dengan fitur *e-Procurement*, semua proses pengadaan dapat direncanakan dan dieksekusi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sehingga mengurangi kemungkinan keterlambatan.

Berdasarkan wawancara peneliti kepada Mba Sandi sebagai Analis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran di Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan mengatakan bahwa:

“Terkait ketepatan waktu mungkin seperti kendala teknis atau non-teknis yang menghambat pencapaian target waktu dalam implementasi GRMS. Sejauh ini kendala yang terjadi sebenarnya tidak terlalu signifikan, seperti pemahaman terkait GRMS yang biasanya diampu oleh pelaksana anggaran atau admin dari setiap Perangkat Daerah mengalami mutasi pegawai atau pensiun dan digantikan oleh pegawai lainnya yang belum begitu memahami GRMS, kami harus selalu menjelaskan dan siap dalam setiap saat di hari kerja maupun akhir pekan, karena penggunaan GRMS adalah penggunaan harian/rutin oleh seluruh Perangkat Daerah. Bahkan, yang sudah benar-benar paham pun harus terus belajar karena aplikasi ini sangat dinamis perkembangannya mengikuti kebijakan Kepala Daerah yang berlaku. Kami sebagai satuan Tim Anggaran Pendapatan Daerah menyupayakan tidak adanya keterlambatan dan hambatan, yang telah menjadi target kami harus tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja kami.”

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa kendala teknis dan non-teknis yang dapat menghambat pencapaian target waktu dalam implementasi GRMS. Salah satu kendala yang sering terjadi adalah mutasi pegawai atau pensiun dari pelaksana anggaran atau admin di setiap Perangkat Daerah, yang kemudian digantikan oleh pegawai baru yang belum memahami GRMS dengan baik. Kondisi ini mengharuskan adanya penjelasan dan dukungan terus-menerus, bahkan pada hari kerja maupun akhir pekan, karena penggunaan GRMS bersifat harian dan rutin oleh seluruh Perangkat Daerah. Selain itu, aplikasi GRMS sangat dinamis dan terus berkembang

mengikuti kebijakan Kepala Daerah yang berlaku, sehingga para pengguna harus terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan tersebut.

Meskipun terdapat potensi keterlambatan, upaya maksimal selalu dilakukan untuk menghindari hambatan ini. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai penyelia, menjadikan ketepatan waktu sebagai target yang harus dicapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja mereka. Dengan demikian, komitmen untuk mencapai ketepatan waktu tetap diupayakan secara optimal guna mendukung efektivitas keseluruhan program GRMS. Dalam praktiknya, TAPD selalu berusaha agar tidak ada keterlambatan atau hambatan yang signifikan, karena hal ini sudah menjadi tugas mereka yang harus dicapai.

Dalam konteks ini, teori Sutrisno tentang ketepatan waktu menunjukkan pentingnya pengelolaan waktu yang efektif dalam implementasi GRMS. Upaya berkelanjutan untuk mengatasi kendala dan menjaga agar program berjalan sesuai jadwal adalah kunci untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta memastikan bahwa GRMS dapat berfungsi secara efektif dalam mendukung pengelolaan keuangan dan administrasi pembangunan di Kota Surabaya.

4. Tercapainya Tujuan

Tercapainya tujuan merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur efektivitas suatu program. Program Government Resource Management System (GRMS) di Kota Surabaya telah dirancang untuk mencapai tujuan penting yang berkaitan dengan mengakomodir Perangkat Daerah di lingkungan Kota Surabaya secara sistematis dalam proses hulu hingga hilir. Mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan rekap realisasi pelaksanaan hingga dilaporkan sebagai bentuk penilaian kinerja pegawai.

Berdasarkan wawancara peneliti kepada Mba Sandi sebagai Analis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran di Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan mengatakan bahwa:

“GRMS dengan segala perkembangan fitur yang ada di dalamnya, kami rasa sudah membantu dalam efisiensi dan efektifitas administrasi Pembangunan di Kota Surabaya. Karena dengan GRMS kami dapat mempermudah proses SPJ, meminimalkan penggunaan kertas dan mempermudah otorisasi menggunakan fitur approval yang dapat dijangkau oleh Pejabat Perangkat Daerah melalui gadget. Indikator kinerja kami sebagai BPBJAP adalah terkait pelayanan yang ada kaitannya dengan GRMS itu sendiri jadi bentuknya adalah pelayanan terhadap seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, maupun kepada penyedia yang ingin melakukan pendaftaran akun LPSE. Untuk setiap permasalahan dalam pelaksanaan anggaran yang dihadapi Perangkat Daerah, kami memiliki batas waktu maksimal dalam pemberian Solusi atas penyelesaian masalahnya, yaitu 7 hari kerja. Kami merasa GRMS ini sudah sangat membantu proses pelaksanaan anggaran yang rutin Pemerintah Kota laksanakan setiap tahunnya mulai hulu sampai hilir. Aplikasi ini sangat membantu mulai dari Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa hingga penilaian kinerja individu pegawai Pemerintah Kota Surabaya.”

Berdasarkan hasil wawancara, aplikasi GRMS telah berhasil meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses administrasi pembangunan di Kota Surabaya. Dengan berbagai fitur yang terus dikembangkan, GRMS mempermudah proses Surat Pertanggungjawaban (SPJ), mengurangi penggunaan kertas, dan memudahkan otorisasi melalui fitur persetujuan yang dapat diakses oleh pejabat perangkat daerah melalui gadget. Hal ini menunjukkan bahwa GRMS telah mampu mencapai tujuan utamanya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi pembangunan.

Selain itu, terdapat beberapa indikator kinerja yang menunjukkan tercapainya tujuan program GRMS. Indikator tersebut termasuk peningkatan pelayanan terhadap seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya serta penyedia layanan yang ingin mendaftar akun LPSE. Untuk setiap permasalahan dalam pelaksanaan anggaran yang dihadapi Perangkat Daerah, GRMS menetapkan batas waktu maksimal dalam memberikan solusi, yaitu 7 hari kerja. Indikator ini menunjukkan bahwa GRMS mampu mengatasi permasalahan dengan cepat dan efektif, sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Manfaat yang diperoleh dari penggunaan GRMS juga dirasakan secara signifikan oleh para pengguna. GRMS telah membantu dalam pelaksanaan anggaran rutin pemerintah kota setiap tahunnya, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga kegiatan pengadaan barang/jasa dan penilaian kinerja individu pegawai Pemerintah Kota Surabaya. Dengan demikian, GRMS tidak hanya berhasil mencapai tujuannya tetapi juga memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kinerja administrasi pembangunan di Kota Surabaya.

Dalam konteks ini, teori Sutrisno tentang tercapainya tujuan menunjukkan bahwa implementasi GRMS telah efektif dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi pembangunan. Indikator kinerja yang menunjukkan percepatan proses, peningkatan akurasi data, dan pengurangan biaya, serta tanggapan positif dari pengguna, semua menjadi bukti keberhasilan program ini. Dengan mencapai tujuan yang ditetapkan, GRMS telah menjadi alat yang vital dalam mendukung pengelolaan keuangan dan administrasi pembangunan di Kota Surabaya.

5. Perubahan Nyata

Indikator perubahan nyata adalah salah satu cara untuk menilai efektivitas suatu program. Sebelum implementasi GRMS, proses pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa sering kali kurang transparan dan akuntabel. Dengan adanya GRMS, semua proses dapat diakses secara elektronik, tapi sangat disayangkan tidak terbuka, sehingga masyarakat tidak dapat memantau penggunaan anggaran secara langsung. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Mba Sandi sebagai Analis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran di Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan mengatakan bahwa:

“GRMS di Kota Surabaya sudah lama diterapkan dan sudah menjadi percontohan bagi Pemerintah Daerah lainnya. Sudah sering juga bagi Pemerintah Daerah lain datang ke Surabaya untuk Studi Tiru dengan membawa programmer masing-masing untuk belajar menerapkan GRMS di Daerah masing-masing dengan melakukan Perjanjian Kerja Sama / MoU Bersama Pemerintah Kota Surabaya.”

Menurut Sutrisno (2007), perubahan nyata adalah salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas suatu program. Indikator ini mencakup perubahan yang dapat diamati dan diukur setelah implementasi program, yang menunjukkan sejauh mana program tersebut berhasil mencapai tujuannya.

Berdasarkan hasil wawancara, implementasi GRMS di Kota Surabaya telah membawa perubahan nyata dalam proses administrasi pembangunan. GRMS telah diterapkan sejak lama dan bahkan menjadi percontohan bagi Pemerintah Daerah lainnya. Banyak Pemerintah Daerah lain yang datang ke Surabaya untuk Studi Tiru, dengan membawa programmer masing-masing untuk belajar menerapkan GRMS di daerah mereka dengan melakukan Perjanjian Kerja Sama atau MoU bersama Pemerintah Kota Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa GRMS telah diakui dan diadopsi sebagai model yang efektif oleh daerah lain, yang merupakan indikator keberhasilan nyata dari program ini.

Perubahan nyata ini juga dapat diukur dan dibuktikan secara empiris melalui berbagai penghargaan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kota Surabaya. Penghargaan-penghargaan ini merupakan bukti dari manfaat yang telah diberikan oleh GRMS dalam meningkatkan kinerja administrasi pembangunan. Meskipun data spesifik dan bukti terkait perubahan ini tersimpan dalam sistem internal dan tidak untuk dipublikasikan, penghargaan yang diterima menunjukkan bahwa implementasi GRMS memiliki dampak positif yang signifikan.

Dengan demikian, perubahan nyata yang terjadi sejak implementasi GRMS di Kota Surabaya mencakup peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam proses administrasi pembangunan, pengakuan dan adopsi oleh Pemerintah Daerah lain, serta berbagai penghargaan yang menunjukkan keberhasilan program ini. Indikator perubahan nyata menurut Sutrisno (2007) jelas tercermin dalam implementasi GRMS di Kota Surabaya, menjadikan program ini sebagai contoh keberhasilan dalam mengelola keuangan dan administrasi pembangunan daerah.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dalam Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas program Government Resource Management System (GRMS) dalam meningkatkan kinerja administrasi pembangunan di Kota Surabaya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi GRMS telah terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi pembangunan. Hal ini terlihat dari indikator kinerja yang menunjukkan percepatan proses, peningkatan akurasi data, dan pengurangan biaya, serta tanggapan positif dari pengguna.
2. GRMS dirancang dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan dasar hukum yang jelas dan kesesuaian terhadap peraturan yang berlaku. Program ini juga berfokus pada transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.
3. Meskipun terdapat beberapa kendala, seperti pergantian pegawai dan kebutuhan untuk pelatihan berkelanjutan, tim penyelia GRMS berkomitmen

untuk menghindari keterlambatan dan memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

4. GRMS telah menjadi alat yang vital dalam mendukung pengelolaan keuangan dan administrasi pembangunan di Kota Surabaya, membantu dalam pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang/jasa secara lebih efisien.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut terdapat beberapa saran:

1. Pemerintah Kota Surabaya harus berkomitmen untuk terus meningkatkan program pelatihan dan sosialisasi bagi pegawai baru dan yang sudah ada, untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang GRMS dan kemampuannya dalam mendukung tugas mereka.
2. Pemerintah perlu mempertimbangkan pengembangan fitur-fitur baru dalam GRMS yang lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna, serta memperhatikan umpan balik dari pengguna untuk meningkatkan pengalaman mereka dalam menggunakan sistem.
3. Diperlukan adanya sistem monitoring dan evaluasi yang berkala untuk menilai efektivitas GRMS secara keseluruhan, serta untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian.

Pemerintah Kota Surabaya perlu menyediakan data keuangan dan pengadaan barang/jasa dalam format terbuka yang dapat diakses oleh masyarakat. Misalnya, publikasi laporan keuangan tahunan dan rincian pengeluaran anggaran dalam bentuk tabel atau grafik yang mudah dipahami. Hal ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Apriliani, R. D., & Panggiarti, E. K. (2020). *Peran Government Resources Management System pada Siklus Akuntansi Keuangan Negara (Studi Kasus Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Jawa Tengah)*. [https://www.semanticscholar.org/paper/Government-Resource-Management-System-\(GRMS\)%3A-Dalam-Fanida-Niswah/bb4224a752e595defc712b9d20d591bc8f225a87](https://www.semanticscholar.org/paper/Government-Resource-Management-System-(GRMS)%3A-Dalam-Fanida-Niswah/bb4224a752e595defc712b9d20d591bc8f225a87)
- Choirunnisa, L., Oktaviana, T. H. C., Ridlo, A. A., & Rohmah, E. I. (2023). Peran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Publik di Indonesia. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 3(1), 71-95. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i1.401>
- E, I. D. (n.d.). *E-Government : Inovasi dalam Strategi Komunikasi*. Kementerian Sekretariat Negara RI. https://www.setneg.go.id/baca/index/e_government_inovasi_dalam_strategi_komunikasi
- Fanida, E. H., & Niswah, F. (2015). *GOVERNMENT RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM (GRMS): INOVASI LAYANAN PUBLIK DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI PEMERINTAH KOTA SURABAYA*. 12(1).
- Humairo Amriza, P., & Suhartati, T. (2022). Analisis Pencapaian Good Governance

- pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPeL) di Politeknik Negeri Jakarta. *Prosiding SNAM PNJ*. <https://sirup.lkpp.go.id>
- Irpan Nurhab, M. (2022). Penyuluhan Pengelolaan Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kinerja Sma Muhammadiyah 4 Kota Bengkulu. *Jurnal Umum Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 23–28. <https://doi.org/10.58290/jupemas.v1i1.44>
- Legi, H. V., Rawis, J. A. M., Simanjuntak, S., & Oentoe, F. J. A. (2020). Model Implementasi e-Government di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado. *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 3(2), 212–228. <https://doi.org/10.30605/jsgp.3.2.2020.333>
- Maulidhia, J. P. (2020). *Faktor-Faktor Sukses Penerapan E-Government Pada GRMS Di Kota Surabaya*. Universitas Airlangga.
- Nurnovianti, C., & Karniawati, N. (2024). Efektivitas Aplikasi E-Kelurahan di Kota Bandung. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 6(1), 166–176.
- Rahardjo, M. (2017). *STUDI KASUS DALAM PENELITIAN KUALITATIF: KONSEP DAN PROSEDURNYA*. https://doi.org/10.1007/978-3-540-29676-8_6903
- Sutrisno, E. (2007). Meningkatkan Kinerja Manajemen Sumber Daya Manusia. In *Kencana Prenada Media Group* (pp. 125–126).